



- Referensi >
- Pengaturan >
- RKPD >
- Standar Harga Satuan ▾
 - SSH
 - HSPK
 - ASB
 - SBU

SSH

PP 12 Tahun 2019

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
3. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

Standar Harga ▾

Arsip

Pengaturan ▾

<input type="checkbox"/>	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	TKDN	Aksi
1.1.12.01.01.0001 Bahan Bangunan dan Konstruksi							
<input type="checkbox"/>	1.1.12.01.01.0001.00082	Cat Tembok	kemasan 5 Kg	Buah	Rp 90,300.00	0.75 %	
<input type="checkbox"/>	1.1.12.01.01.0001.00083	Cat tembok anti lumut	kemasan 5 Kg	Buah	Rp 86,000.00	0.75 %	
<input type="checkbox"/>	1.1.12.01.01.0001.00084	Pasir Urug	Pasir Urug	M3	Rp 550,000.00	0.75 %	
<input type="checkbox"/>	1.1.12.01.01.0001.00085	Semen	Batu Raja	Zak	Rp 80,000.00	0.75 %	
<input type="checkbox"/>	1.1.12.01.01.0001.00086	Tegel Keramik	ukuran 30 x 30 cm warna	Kotak	Rp 93,450.00	0.75 %	
<input type="checkbox"/>	1.1.12.01.01.0001.00087	Bahan Timbunan Pilihan/Tanah Puru	Tanah timbunan Wilayah 1	M3	Rp 164,450.00	0.75 %	
<input type="checkbox"/>	1.1.12.01.01.0001.00088	Bahan Timbunan Pilihan/Tanah Puru	Tanah timbunan Wilayah 2	M3	Rp 164,450.00	0.75 %	

[Panduan Penggunaan](#)



TAHUN : 2026



108 ms



Kab. Ogan Komering Ilir
Bima



- Referensi >
- Pengaturan >
- RKPD >
- Standar Harga Satuan >
 - SSH
 - HSPK**
 - ASB
 - SBU

HSPK

PP 12 Tahun 2019

- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

Pencarian

+ Standar Harga

Arsip

Pengaturan

Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	TKDN	Aksi
8.1.02.01.04.0538 Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan						
<input type="checkbox"/> 8.1.02.01.04.0538.00001	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/PakanM2 Alami/Tandon/Bak Pendederan		Rp 2,850,000.00	1 %	
<input type="checkbox"/> 8.1.02.01.04.0538.00002	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan	M2	Rp 4,750,000.00	1 %	
8.1.02.03.03.0001 Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						
<input type="checkbox"/> 8.1.02.03.03.0001.00020	Pemeliharaan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Tidak Bertingkat	M2/Tahun	Rp 147,000.00	1 %	

Panduan Penggunaan



TAHUN : 2026



71 ms



Kab. Ogan Komering Ilir
Bima



- Referensi >
- Pengaturan >
- RKPD >
- Standar Harga Satuan >
 - SSH
 - HSPK
 - ASB**
 - SBU

ASB

PP 12 Tahun 2019

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
3. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

Pencarian

Standar Harga

Arsip

Pengaturan

<input type="checkbox"/>	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	TKDN	Aksi
1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor							
<input type="checkbox"/>	1.3.03.01.01.0001.00001	bangunan gedung	Pembangunan gedung sederhana	M2	Rp 6,180,000.00	90 %	
<input type="checkbox"/>	1.3.03.01.01.0001.00002	bangunan gedung	Pembangunan gedung tidak sederhana	M2	Rp 7,520,000.00	90 %	
<input type="checkbox"/>	1.3.03.01.01.0001.00003	bangunan gedung	Rehabilitasi 25% gedung sederhana	M2	Rp 1,545,000.00	90 %	
<input type="checkbox"/>	1.3.03.01.01.0001.00004	bangunan gedung	Rehabilitasi 25% gedung tidak sederhana	M2	Rp 1,880,000.00	90 %	
<input type="checkbox"/>	1.3.03.01.01.0001.00005	bangunan gedung	Rehabilitasi 50% gedung sederhana	M2	Rp 3,090,000.00	90 %	

Panduan Penggunaan



TAHUN : 2026



78 ms



Kab. Ogan Komering Ilir
Bima



Referensi >

Pengaturan >

RKPD >

Standar Harga Satuan >

SSH

HSPK

ASB

SBU

SBU

PP 12 Tahun 2019

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
3. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

Pencarian

Standar Harga

Arsip

Pengaturan

Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan	TKDN	Aksi
1.1.12.01.01.0012 Bahan Lainnya						
<input type="checkbox"/> 1.1.12.01.01.0012.00001	Bahan Pelatihan	Bahan Bahan Pelatihan	Paket	Rp 10,000,000.00	1 %	
1.1.12.01.05.0001 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat						
<input type="checkbox"/> 1.1.12.01.05.0001.00001	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembuatan Sarana dan Prasarana di Destinasi Cagar Budaya	Paket	Rp 90,000,000.00	1 %	
<input type="checkbox"/> 1.1.12.01.05.0001.00002	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Pembuatan Sarana dan Prasarana di Destinasi Wisata	Paket	Rp 93,000,000.00	1 %	
8.1.01.03.07.0001 Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Panduan Penggunaan